

PROPAGANDA POLITIK PASCAKEBENARAN (*POST-TRUTH*) MENJELANG PEMILU 2024 DAN ANCAMANNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA KONTEMPORER

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri Madura

Hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract

In the midst of heating up domestic political tension ahead of the 2024 presidential election (Pilpres), various political maneuvers and discourses have begun to surface to the public, one of which is post-truth political discourse. In Indonesia, post-truth politics is identified by many groups as political intrigue that focuses its maneuvers on political propaganda, especially those rooted in false narratives in the name of identity. This study focuses on examining the phenomenon of post-truth political propaganda ahead of the 2024 Pilres and its threats to the building of democracy in contemporary Indonesia. This paper is a qualitative study using library techniques. The sources and types of data used in this study are secondary data, especially data sourced from books, journals, and various results of previous studies. After using field data analysis based on the perspective of political sociology theory, this study found findings that ahead of the 2024 Presidential Election, posttruth political propaganda is starting to return to the public sphere through various political propaganda that appears in the form of issues of religious and identity. Reflecting on the political dynamics in the previous elections, 2014 and 2019, the use of post-truth political propaganda has the potential to have a large negative effect. This not only threatens the stability of society at the grassroots level but also has great potential to damage the future and sustainability of democracy in Indonesia.

Keywords: *Propaganda politics, Post-truth politics, 2024 presidential election, Democracy in Indonesia*



A. Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, perbincangan seputar politik Indonesia beserta segala dinamika di dalamnya seakan menjadi tema yang tak kunjung ada habisnya, baik perbincangan tersebut ada pada wilayah praktik maupun wilayah teoritik. Pada wilayah teoritik, wacana seputar politik menemukan ruangnya ketika narasi politik nasional dihadapkan pada persoalan identitas yang berakar pada suku, ras, golongan, dan agama. Penggunaan isu-isu primordial, khususnya yang bercokol pada simbol dan lambang (aliran) agama tertentu (baca: politisasi agama), secara langsung tidak saja telah mengancam bangunan demokrasi, pun lebih dari itu telah merong-rong jati diri dan tenun kebangsaan Indonesia yang selama ini identik dengan kebhinekaan.¹

Sedangkan pada wilayah praktik, diskursus politik nasional menemukan ruangnya sebagai konsekuensi dari semakin riuhnya pertarungan politik di tingkat elit, baik pertarungan di level elektoral maupun di level nasional. Di level elektoral keriuhan muncul seiring bergulirnya tahun politik menjangan Pemilu serentak 2024. Meski gelaran kontestasinya masih relatif jauh dan lama, namun geliat manuver dan tensinya sudah mulai terasa hangat sejak sekarang.² Memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2024, baik pemilihan di level eksekutif maupun legislatif, itu terlihat jelas dari keberadaan para elit politik kita yang saat ini kian aktif memperlihatkan eksistensinya di ruang publik. Masing-masing parpol mulai melakukan

¹ Mifdal Zusron Alfaqi, "Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda," *Jurnal Civics* 13, no. 2 (2016): 8.

² Roy Ratumakin, "Tensi Politik Meningkat, Sosok Ini Presiden di 2024 Gantikan Jokowi?," *Tribun-papua.com*, last modified June 5, 2022, accessed May 16, 2023, <https://papua.tribunnews.com/2022/06/05/tensi-politik-meningkat-sosok-ini-presiden-di-2024-gantikan-jokowi>.



konsolidasi internal, melakukan penjajakan dan geriliya guna membangun kekuatan politik untuk memenangkan perhelatan Pemilu 2024.³

Meski pada Pilpres 2024 tidak ada lagi pertandingan ulang (*remacht*) antara Jokowi dan Prabowo Subianto seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019, itu tidak lantas disimpulkan bahwa kontestasi politik akan berjalan tenang-tenang saja. Sebaliknya, banyak kalangan memprediksikan gelaran pilpres 2024 tidak saja akan berjalan alot mengingat para bakal calon yang digadang-gadang maju memiliki tren elektabilitas cukup tinggi dan ketat. Lebih darinya, besar kemungkinan proses kontestasi akan berjalan sengit dan memanas, bahkan boleh jadi melebihi suhu politik di tahun 2019.⁴ Faktanya, aroma politik identitas yang sempat berkecamuk di pilpres 2014 dan 2019, pelan-pelan mulai mencuat dan muncul kembali ke permukaan publik. Dalam kaitan ini, ada kecenderungan di saat derasny arus informasi di kanal-kanal media sosial, bersamaan dengan itu beberapa kelompok dengan lihai memanfaatkan berita-berita palsu, menyinggung isu-isu identitas dan primordialisme dalam rangka menciptakan ketidakstabilan politik.⁵

Mengemukanya propaganda politik dalam varian dan modus demikian, itu muncul sebagai bentuk kahadiran politik global yang saat ini

³ Redaksi, "Menjaga Tensi Politik," *kompas.id*, last modified October 4, 2022, accessed May 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/04/menjaga-tensi-politik>.

⁴ Estu Suryowati, "Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan," *Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan - Jawa Pos*, last modified August 17, 2021, accessed May 16, 2023, <https://www.jawapos.com/politik/01339706/panas-lebih-cepat-peta-pilpres-2024-bakal-mulai-terlihat-tahun-depan>.

⁵ Ayu Nurfaizah, "Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024," *kompas.id*, last modified March 2, 2023, accessed May 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024>.



kita kenal dengan politik pascakebenaran (propaganda politik *posttruth*).⁶ Dalam konteks Indonesia, politik pascakebenaran mulai menemukan gejala sosialnya ketika muncul berbagai peristiwa politik yang berisikan halusinasi atas ancaman bangsa-negara. Instrumen politik global yang di satu sisi mengandung halusinasi (kebohongan), namun pada saat bersamaan memiliki kemampuan strategis mendatangkan rasa takut. Khususnya bagi masyarakat akar rumput yang secara sosial ekonomi berada di kelas menengah ke bawah.⁷ Pada gelaran pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), intrik kebohongan dan intimidasi dalam politik *posttruth* dapat dilacak pada diskursus politik para elit, di mana saat itu berkembang ragam metanarasi politik untuk kepentingan konsumsi politik yang melebihi fakta sesungguhnya. Beberapa di antaranya adalah metanarasi tentang ancaman penjajahan ekonomi asing, dikotomisasi pribumi dan asing-aseng, politik genderowo, politik sentoloyo terusirnya kaum pribumi, Indonesia akan bubar pada tahun 2030.⁸

Sementara itu, di level akademik, kajian seputar politik pascakebenaran dalam konteks gelaran Pilpres sudah pernah dilakukan, salah satunya datang dari tulisan Amilin (2019). Dalam kajian ini, dirinya mendapati temuan bahwasanya politik pascakebenaran memiliki risiko dan dampak negatif cukup besar terhadap stabilitas masyarakat. Demikian

⁶ Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*; Vol 10, No 2 (2020): *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DOI - 10.18326/ijims.v10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020), <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.

⁷ Muh Iqbal Latief, "Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilu 2019," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019).

⁸ Danu Damarjati Nugroho Bagus Prihantoro, "Kaleidoskop 2018: Heboh Prabowo Bicara Prediksi RI Bubar di 2030," *detiknews*, last modified Des 2018, accessed May 16, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4357883/kaleidoskop-2018-heboh-prabowo-bicara-prediksi-ri-bubar-di-2030>.



karena politik pascakebenaran sering kali melandaskan dirinya pada kebohongan dan pemanfaatan berita palsu,⁹ Berkaca pada Pilpres 2019, kebohongan dan kepalsuan pada politik pascakebenaran berakibat signifikan terhadap bangkitnya sisi emosional masyarakat, sehingga pada akhirnya membuat pemilih kehilangan rasionalitasnya. Itulah sebabnya, pada politik pascakebenaran, masyarakat kerap kali dibuat fanatik, daya kritis mereka sebagai pemilih (voter) melemah dan semakin permissif. Perdebatan tentang kepemimpinan lebih dominan berputar di wilayah-wilayah primordial seperti isu identitas, suku, ras, dan agama, bukan berdebat pada aspek-aspek substansial yang bersentuhan dengan kapasitas, kemampuan, dan integritas diri. Secara faktual, merujuk pada studi yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif (2020), bahaya laten intrik politik pascakebenaran dapat dilacak pada pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, tepatnya ketika publik mengalami guncangan cukup hebat akibat massifnya pemberitaan palsu, yang saat itu memenuhi kanal-kanal media informasi publik, baik media cetak dan lebih-lebih media *online*.¹⁰

Namun demikian, betapapun studi tentang politik pascakebenaran dalam konstelasi politik nasional sudah pernah dilakukan, itu tidak lantas membuat kajian tentangnya tidak lagi ‘seksi’ untuk dibicarakan. Sebaliknya, dalam konteks politik di Indonesia kontemporer, diskursus seputar tema ini sampai sekarang masih tergolong penting dan menarik dilakukan. Penting karena sebagaimana kita ketahui bersama, politik pascakebenaran identik dengan manuver dan diskursus politik penuh kebohongan, kepalsuan,

⁹ Amilin Amilin, “Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 39 (September 2019).

¹⁰ Syarif, A. Mughni, and Hannan, “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.”



pencitraan, dan penuh propagand.¹¹ Seni berpolitik dengan cara demikian mutlak dapat menimbulkan dampak buruk karena berpotensi besar menghadirkan perpecahan masyarakat di akar rumput. Kontestasi politik tidak lagi dibangun atas dasar pertarungan gagasan dan ide pembangunan, namun lebih banyak dibumbui oleh narasi-narasi kebencian dan kebohongan.¹² Adapun terbilang menarik, karena meski selama ini term politik pascaebanaran memiliki stigma negatif, namun faktanya hingga detik ini narasi tentangnya masih tetap berjalan bebas dan berkeliaran di ruang-ruang publik. Bahkan seolah sengaja dimunculkan oleh para elit politisi dan petinggi partai politik sebagai strategi meraup suara dan dukungan publik untuk memenangkan perebutan kursi kekuasaan di tahun 2024, baik kursi Istana kpresidenan maupun kursi parlemen.¹³ Dalam perspektif inilah sesungguhnya kajian ini menemukan dimensi fundamentalnya. Bahwa menguatnya intrik politik pascakebenaran di kalangan elit yang dalam satu dekade terakhir mewarnai dinamika kontestasi kekuasaan di Indonesia, baik kekuasaan di level legislatif maupun eksekutif, di tingkat daerah, propinsi maupun nasional, itu sesungguhnya memuat ancaman cukup serius. Terutama bagi masa depan dan keberlangsungan demokrasi substansial di Indonesia.

Metode Penulisan

¹¹ Ayon Diniyanto and Wahyudi Sutrisno, "Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 1, 2022): 44–58.

¹² Cosmas Eko Suharyanto, "Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10, no. 2 (2019).

¹³ Afrito Eka Kurniawan, "Pemilu Serentak 2024 Picu Munculnya Post Truth Politic | Kumparan.Com," *Https://Kumparan.Com/*, last modified Desember 2022, accessed May 16, 2023, <https://kumparan.com/236-afrito-eka-kurniawan/pemilu-serentak-2024-picu-munculnya-post-truth-politic-1zXcWfU2Kfm>.



Secara metodologi, penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada tujuan utama penelitian yang ingin menggali dan menggambarkan diskursus politik pascakabupaten dalam dinamika politik di Indonesia kontemporer, menelusuri rangkaian manuver politik pascakebupaten yang sejauh ini dilakukan oleh para elit politisi, dan dengan cara apa saja para elit mengoperasikan model politik pascakebupaten ketika terjun dan terlibat langsung dalam arena kekuasaan menjelang Pemilu 2024, baik di level eksekutif maupun legislatif. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, data primer yang diperoleh dari kegiatan observasi dan aktivitas wawancara mendalam beresama sejumlah informan baik informan kunci maupun informan pendukung. Selain itu, juga ada data sekunder berupa data-data kepustakaan dari sumber-sumber literatur terdahulu yang objek pembahasannya memiliki keterkaitan kuat dengan masalah utama penelitian ini. Sumber literatur dalam kajian ini peneliti batasi pada hasil penelitian yang terbit kisaran tahun 2014-2023, baik hasil penelitian yang berbentuk kegiatan kajian lapangan maupun studi kepustakaan. Adapun kriteria sumber literatur yang dijadikan sumber tulisan ini adalah laporan penelitian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau sejumlah lembaga penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, buku maupun prosiding. Selain itu, data sekunder dalam penelitian juga berasal dari informasi atau berita yang diperoleh dari media, baik cetak maupun *online* yang terbit pada periode 2014-2023.

Teknik analisa penelitian ini akan menggunakan model Miles *and* Heberman. Miles *and* Heberman dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwasanya analisa data meliputi tiga tahap; reduksi data, penyajian data,



dan penarikan simpulan.¹⁴ Tahap reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilih, dan menyaring data sehingga nantinya dapat diperoleh bahasan-bahasan penting yang berkaitan langsung dengan fokus utama penelitian. Penyajian data, yakni mendeskripsikan data dalam bentuk narasi atau uraian, sehingga dapat menggambarkan dan menampilkan *setting* alamiah realitas secara detail dan mendalam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yakni melanjutkan dan mengembangkan proses penelitian pada tahap paling akhir berupa temuan pokok atau inti yang menjadi jawaban masalah penelitian

B. Pembahasan

Postmodernisme dan Genealogi Kelahiran (Politik) *Posttruth*

Perbincangan tentang politik propaganda politik *posttruth* secara langsung akan mengantarkan kita pada perbincangan postmodernisme, demikian karena antara propaganda politik *posttruth* dan postmodernisme memiliki keterkaitan cukup dekat. Jika digambarkan, hubungan antara kedua term ini layaknya dua sisi mata uang. Namun bukan dalam hal saling menegasikan, melainkan saling berhubungan dan berdekatan. Begitu dekatnya hubungan postmodernisme dengan propaganda politik *posttruth*, sehingga bisa dianalogikan postmodernisme adalah induk, sedangkan propaganda politik *posttruth* adalah wujud kebudayaan kekinian yang lahir dari rahim postmodernisme. Pertanyaan besarnya kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan postmodernisme? Dalam hal apa postmodernisme memiliki keterkaitan dengan politik *pos-truth*?

Pada tataran filosofis, postmodernisme menolak paradigma berpikir modernisme yang sangat menekankan pada pendekatan positivistik. Dirinya

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, Cet. XV* (Bandung: ALFABETA, 2010).



mengkritik logika berpikir modernisme yang menyandarkan rumus kebenaran pada objektivitas. Jika modernisme menekankan pada kehadiran makna melalui logika positivisme Comte (*Seeing is believing*), maka lain halnya dengan postmodernisme.¹⁵ Dirinya cenderung mempermainkan makna (*language game*) melalui proses permainan tanda dan penanda, sehingga apa yang disebut kenyataan, fakta, dan kebenaran menjadi majemuk. Merujuk pada penjelasan Jean Baudillard, postmodernisme adalah era hiperealitas, yakni realitas yang melebihi keberadaan aslinya karena ketiadaan makna, hilangnya kedalaman definisi yang disebabkan oleh adanya dominasi citra atas fakta, tergesernya sisi faktual karena kehadiran artifisial.¹⁶ Itulah sebabnya, dalam era postmodernisme fakta dan realitas hadir tanpa memiliki landasan cukup jelas, kecuali sekedar citraan diri melalui permainan tanda dan simbol.

Jika postmodernisme mengandaikan pada kekaburan makna dan definisi, maka propaganda politik *posttruth* adalah salah satu wujud nyata dari kekaburan makna itu sendiri. Dalam banyak kesempatan, propaganda politik *posttruth* juga diartikan sebagai realitas kontemporer di mana objektivitas kurang mendapatkan tempat karena tergeser oleh subjektivitas dan relativitas.¹⁷ Term objektivitas di sini merujuk pada kehadiran fakta yang mendasarkan dirinya pada kenyataan dan sumber cukup jelas seperti data, institusi, dan legitimasi lembaga. Sedangkan term subjektivitas

¹⁵ Muh. Hanif, "Studi Media dan Budaya Populer dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (January 1, 1970): 235–251; George Ritser, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*, IV. (Bantul: Kreasi wacana, 2010).

¹⁶ Sinoj Antony and Ishfaq Ahmad Trambo, "Hyperreality in Media and Literature: An Overview of Jean Baudrillard's," *Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 6.

¹⁷ Renate E. Meyer and Paolo Quattrone, "Living in a Post-Truth World? Research, Doubt and Organization Studies," *Organization Studies* 42, no. 9 (September 1, 2021): 1373–1383.

mengandaikan pada klaim atau pernyataan perseorangan yang sengaja dimunculkan sebagai antitesis terhadap fakta sesungguhnya. Subjektivitas mengandung makna relatif, bahwa konsep tentang benar itu tidak tunggal. Benar itu bersifat jamak, dapat dijumpai dari pintu dan arah mana saja. Tujuan dimainkannya propaganda politik *posttruth* tidak lain adalah untuk memperkeruh keadaan, memainkan perasaan dan sisi emosional publik, sehingga konstruksi makna kebenaran menjadi mengabur, dan kedalaman definisi menjadi hilang. Dalam praktiknya, propaganda politik *posttruth* lebih banyak operasi di ruang publik, khususnya media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan lain sebagainya.¹⁸ Merujuk pada penjelasan ini, baik post-trut maupun postmodernisme sesungguhnya memiliki pola dan identitas sama, yakni sama-sama mengandaikan pada pengaburan kebenaran dan realitas sebenarnya.

Secara genealogis, sebagai sebuah terminologi istilah propaganda politik *posttruth* pada dasarnya bukan hal baru dalam perbendaharaan bahasa, term ini sudah sejak lama muncul dan digunakan banyak pihak di beberapa kesempatan. Dalam dunia jurnalis, istilah propaganda politik *posttruth* pertama kali diperkenalkan oleh Steve Tesich dalam esainya berjudul *The Government of Lies* yang dimuat majalah *The Nation* tahun 1992.¹⁹ Secara umum esay ini berisikan kritik Tesich terhadap kebijakan Amerika Serikat, seperti kebijakan terhadap Iran pada masa pemerintahan Ronald Reagan serta kebijakan Perang Teluk. Menurut Tesich, keberhasilan AS mengkondisikan warganya atas agresi yang akan mereka lakukan terhadap negara-negara teluk persia tidak lepas dari kepiawaian mereka memainkan

¹⁸ Stamatis Poulakidakos, Anastasia Veneti, and Christos Fangonikolopoulos, "Post-Truth, Propaganda and the Transformation of the Spiral of Silence," *International Journal of Media & Cultural Politics* 14 (September 1, 2018): 367–382.

¹⁹ Steve Tesich, "A Government of Lies," last modified 1992, accessed May 16, 2023, <https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982>.



opini, terutama dalam hal membangkitkan emosional dan perasaan warga AS. Dengan bangunan opini yang mereka buat, harapan warga Amerika Serikat akan perdamaian praktis membeku, sehingga mereka pun tidak memiliki kepedulian terhadap kenyataan dan kebenaran yang disembunyikan di baliknya.²⁰

Jika merujuk pada penjelasan Kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Petrus Reinhard (2019), post truth diartikan sebagai “*Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*,” yakni keadaan yang berhubungan atau menunjukkan fakta-fakta yang objektif, tapi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, yang lebih menjadi perhatian adalah emosi dan kepercayaan pribadi.²¹ Untuk bisa menysasar aspek emosi ini, propaganda politik *posttruth* cenderung memanfaatkan isu-isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan kondisi sosial di saat itu. Isu sensitif yang dimaksud bisa berbentuk unsur ekonomi, politik, bahkan hingga ke ranah paling primordial, seperti halnya isu (sekte) agama, ras, bahkan hingga isu rasial sekalipun. Gambaran nyata penggunaann isu sensitif di sini adalah kampanye politik Donald Trump yang saat itu mengkampanyekan politik anti imigran muslim, sebagai solusi atas maraknya aksi radikalisme kaum imigran. Kemudian kampanye pendirian tembok perbatasan AS-Meksiko, untuk menekan keluar-masuknya warga Meksiko ke negara AS.²²

²⁰ Steve Tesich, “A Government of Lies,” *The Nation* (New York, N.Y.) 254, no. 1 (1992): 12-.

²¹ Petrus Reinhard Golose, “Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (2019).

²² CNN Indonesia, “Jejak Rasial Trump, Tuding Obama Muslim hingga Benci Imigran,” *internasional*, last modified July 16, 2019, accessed May 16, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190716114013-134-412497/jejak-rasial-trump-tuding-obama-muslim-hingga-benci-imigran>.



Menurut Stephen Colbert (dalam Waldman, 2016), di beberapa aspek *post truth* sejatinya memiliki kesamaan dengan terma *truthiness* yang berarti keyakinan atas sesuatu yang terasa walaupun sebenarnya tidak didukung dengan fakta yang ada.²³ Sebagai sebuah keyakinan, propaganda politik *posttruth* beroperasi tidak melalui hukum-hukum logis. Sebaliknya cenderung membelakangi akal sehat, tidak berpijak pada data, tidak juga pada legitimasi institusi sebagaimana bangunan tesis pada umumnya. Sasaran utama propaganda politik *posttruth* adalah sisi emosial dan perasaan individu. Karenanya, narasi yang dibangun di dalamnya lebih banyak berupa isu primordial yang bersentuhan langsung dengan wilayah-wilayah personal dan keyakinan dalam hal beragama. Efek negatif yang ditimbulkan adalah terbelahnya akal sehat dan keyakinan. Antara akal dan hati tidak lagi ada dalam hubungan dialektika-produktif, melainkan saling menegasikan dan mengarah pada hubungan destruktif. Puncak dari semuanya adalah munculnya sikap dan perilaku sentimen²⁴. Individu bertindak bukan karena dorongan logika sehat, melainkan lebih dibentuk oleh perasaan emosi, bahkan tidak jarang berujung pada tindakan fanatisme. Fanatisme inilah yang kemudian menjadi variabel penjelas, mengapa di banyak kesempatan masyarakat yang menderita gejala (politik) propaganda politik *posttruth* cenderung memperlihatkan militansi dalam bersikap dan berperilaku.

Propaganda politik *posttruth* sebagai Fenomena Politik Global

²³ Paul Waldman, "How America Skidded from 'Truthiness' to 'Post-Truth,'" *The Week*, last modified November 29, 2016, accessed May 16, 2023, <https://theweek.com/articles/664112/how-america-skidded-from-truthiness-posttruth>.

²⁴ Joe Allen, "Stephen Colbert Claims 'Post-Truth' Is Just a 'Truthiness' Ripoff," *Paste Magazine*, last modified November 18, 2016, accessed May 16, 2023, <https://www.pastemagazine.com/comedy/stephen-colbert/stephen-colbert-claims-post-truth-is-just-a-truthi>.



Dalam perkembangannya, propaganda politik *posttruth* sebagai fenomena sosial kekinian sering kali dihubungkan dengan fenomena politik global, terutama dari kelompok politik yang berafiliasi dengan ideologi kanan²⁵. Terdapat sekian peristiwa politik global yang menandai trend penggunaan propaganda politik *posttruth* sebagai *political strategy*. Keberhasilan Jair Bolsonaro di Brasil, Duterte di Filipina, dan Brexit yang terjadi di Inggris (2016), Miloš Zeman di Ceko (2018), Viktor Orbán di Hungaria (2010). Dan paling fenomenal dari semuanya adalah kemenangan Trump atas Hillary Clinton dalam pilpres USA (2016). Dalam pandangan banyak kalangan, kegemilangan karir politik Trump yang saat itu menggunakan strategi politik *post-truth*, secara signifikan telah menarik perhatian banyak elit politik dunia, menduplikasinya sebagai strategi politik untuk memperebutkan kekuasaan di negara masing-masing. Mengeliatnya trend penggunaan *post-truth* sebagai intrik politik global, berbanding lurus dengan rilis kamus Oxford, yang pada tahun 2017 menjadikan *propaganda politik posttruth* sebagai “*Word of the Year*”. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya jumlah pemakaian kata *post truth* hingga mencapai 2000 persen dari tahun sebelumnya, 2015.²⁶ Peningkatan tersebut paling banyak dipengaruhi oleh momentum politik Amerika Serikat, di mana pada saat itu *propaganda politik posttruth* diidentifikasi pada fenomena merajalelanya *Trump politics effect*.²⁷

Pada level politik global, pertarungan politik antara Hillary Clinton dan Donald Trump pada tahun 2016 lalu, dinilai banyak kalangan sebagai awal

²⁵ Edited Stephen McGlinchey et al., *Global Politics in a Post-Truth Age* (E-International Relations Bristol: England, 2022).

²⁶ theguardian.com theguardian.com, “‘Post-Truth’ Named Word of the Year by Oxford Dictionaries,” *The Guardian*, last modified November 15, 2016, accessed May 16, 2023, <http://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries>.

²⁷ BBC News BBC News, “‘Post-Truth’ Declared Word of the Year by Oxford Dictionaries,” *BBC News*, last modified November 16, 2016, accessed May 16, 2023, <https://www.bbc.com/news/uk-37995600>.



kejayaan propaganda politik *posttruth* di panggung politik dunia. Kemenangan Trump atas Hillary saat itu, diklaim buah keberhasilan Trump memainkan intrik propaganda politik *posttruth*, memainkan politik data, memanipulasi kenyataan dengan cara menyerang lembaga dan institusi pemerintah.²⁸ Dalam kaitan ini, Trump dengan sesumbarnya selain menyebut Hillary Clinton sebagai pembongkaran besar, dirinya juga menuduh klaim keberhasilan dan prestasi rezim Barack Obama selama memimpin Amerika Serikat, seperti ketersediaan lowongan pekerjaan, menurunnya kemiskinan, rendahnya pengangguran, stabilnya ekonomi dan politik, diklaimnya sebagai sebuah kebohongan belaka.²⁹ Tak tanggung-tanggung, dirinya dengan berani menyerang media, menuduh mereka telah memproduksi 'fake news' dengan menyuguhkan data dan informasi yang tidak benar³⁰. Tidak berhenti di situ, kampanye politik propaganda politik *posttruth* Trump juga menyoroti isu-isu rasial yang berpotensi besar meningkatkan kebencian atas nama agama dan ras. Khususnya keberadaan imigran muslim dan masyarakat kulit hitam di Amerika.³¹

Satu rupa dengan politik Trump, yaitu kemenangan Jair Bolsonaro di Brasil. Secara umum, pola politik Bolsonaro ketika berhasil memenangkan kontestasi kepemimpinan di Brasil memiliki kesamaan dengan pola politik Trump. Kesamaan tersebut ada pada penggunaan politik propaganda politik *posttruth* berupa politik intimidasi dan kebohongan. Untuk memengaruhi dan menarik dukungan para pemilih Brasil, Bolsonaro melakukan propaganda

²⁸ Diana C. Mutz, "Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 19 (May 8, 2018): E4330–E4339.

²⁹ Denny Armandhanu, *Donald Trump Sebut Hillary Clinton 'Pembongkaran Kelas Dunia'*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160623120040-134-140364/donald-trump-sebut-hillary-clinton-pembongkaran-kelas-dunia>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

³⁰ Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, "Social Media and Fake News in the 2016 Election," *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (May 1, 2017): 211–236.

³¹ Alexandre Bovet and Hernán A. Makse, "Influence of Fake News in Twitter during the 2016 US Presidential Election," *Nature Communications* 10, no. 1 (January 2, 2019): 7.



politik dengan membangun opini publik tentang kebangkitan komunisme di Brasil.³² Bolsonaro senantiasa menjadikan ancaman komunis sebagai komoditas politik yang selalu ia lontarkan di setiap kampanye politiknya.³³ Kelihaiannya Bolsonaro memanfaatkan perasaan dan emosi rakyat Brasil yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan atas bangkitnya komunis, pada akhirnya membuat nama Bolsonaro dielu-elukan masyarakat Brasil. Buah dari semuanya Bolsonaro pun melenggeng mudah ke tampuk kekuasaan. Dengan begitu, kemenangan Trump di AS (2016), disusul keberhasilan Bolsonaro di Brasil (2018), kemudian di dipertegas oleh rentetan peristiwa politik global lainnya, Victor Orbán di Hungaria (2010), fenomena Brexit yang berujung pada keluarnya Inggris dari Uni Eropa (2016), Miloš Zeman di Ceko (2018), pada akhirnya semakin menambah catatan kegemilangan propaganda politik *posttruth* sebagai *political strategy* global.³⁴

Rentetan kegemilangan politik propaganda politik *posttruth*, terutama melalui kekuatan politik propagandanya, pada akhirnya menstimulus negara-negara belahan dunia menduplikasinya. Propaganda politik *posttruth* berinovasi sebagai proyek politik global yang menarik perhatian banyak elit politisi global. Bukan hanya di negara-negara maju di belahan Eropa dan Amerika Latin, seperti AS, Inggris, Ceko, dan Brasil, namun juga menyebar luas ke negara-negara berkembang di wilayah Asia. Di Asia sendiri, propaganda politik *posttruth* berhasil mengantarkan Rodrigo Duterte sebagai pemimpin Filipina (2016). Kemenangan sederat elit politisi di berbagai negara di atas pastinya sedikit banyak akan menginspirasi negara Asia lainnya, tak terkecuali

³² Ana Cristina Suzina, "Brazil, Hijacked by Post-Truth," *OpenDemocracy*, last modified October 22, 2018, accessed May 16, 2023, <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil-hijacked-by-post-truth/>.

³³ Fetra Tumanggor, *Beternak hoaks dan Jualan Isu Komunis, Bolsonaro Menang Pilpres Brazil*, <https://www.tagar.id/beternak-hoaks-dan-jualan-isu-komunis-bolsonaro-menang-pilpres-brazil>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

³⁴ Sebastian Schindler, "The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics," *Review of International Studies* 46, no. 3 (July 2020): 376–394.



Indonesia yang tahun depan akan mengelat kontestasi Pemilu 2024, dalam hal ini Pilpres dan Pileg.

Propaganda politik *Posttruth* dalam Kontestasi Kekuasaan di Indonesia

Populernya politik propaganda politik *posttruth* di berbagai belahan dunia, terutama pascakemenangan Donald Trump, secara langsung mengubah peta politik global. Di Indonesia, gejala kemunculan propaganda politik *posttruth* ditandai oleh bergsernya politik di level elit pada penggunaan isu-isu primordial, seperti isu agama, identitas, kelompok, dan golongan etnis tertentu, baik politik di tingkat elektoral maupun nasional. Menggeliatnya penggunaan isu identitas dan agama, secara langsung membuat ruang politik berubah signifikan, tidak saja memanans, namun juga menjadi gaduh. Berbagai peristiwa politik sepanjang tahun 2017-2019, diawali oleh kegaduhan politik di Pilkada DKI hingga memenasnya suhu politik di Pilpres 2019, kesemuanya tidak lepas dari bergulirnya bola politik propaganda politik *posttruth* yang sengaja dimainkan oleh para pemangku kepentingan.³⁵ Untuk dapat memberi penjelasan mendalam perihal fenomena kemunculan politik propaganda politik *posttruth* di Indonesia, berikut akan dijelaskan tiga gejala politik propaganda politik *posttruth* yang terjadi sepanjang periode 2016-2023.

a) Politik Identitas

Secara konseptual, identitas merupakan kata benda yang memuat makna ciri-ciri, keadaan khusus orang atau jati diri seseorang.³⁶ Makna identitas sebagai jati diri, ciri-ciri, dan keadaan khusus di sini mengandaikan bahwa term identitas digunakan pada suatu yang bersifat personal dan

³⁵ Latief, "Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019."

³⁶ Omen Sahabi and Ilya Nacho, *The Consequences of Political Identity for a Democratic System*, preprint (Thesis Commons, February 18, 2020), accessed May 16, 2023, <https://osf.io/pdnf>.



privasi. Sebabnya, hal menyangkut identitas tidak bisa dicampuri, terlebih diintervensi oleh orang di luarnya. Jika mengacu pada pendefinisian di atas, politik identitas berarti politik yang mencampuradukan unsur personal atau pribadi ke dalam ranah urusan publik. Masuk dalam term identitas dan pribadi di sini adalah suku, etnisitas, dan agama.³⁷

Istilah politik identitas di Indonesia sejatinya bukan terminologi baru, keberadaannya sudah dikenal lama, bahkan senantiasa muncul di setiap perayaan kontestasi kepemimpinan. Di mana terdapat perebutan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional, di situlah isu menyangkut identitas bermunculan. Term identitas dikenal sebagai komoditas politik yang memiliki peran dan fungsi yang tidak saja strategis, namun juga efektif dalam memengaruhi sikap dan perilaku politik pemilih, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput. Alasan inilah yang menyebabkan mengapa keberadaan identitas beserta segala dinamikanya, menjadi salah satu komoditas politik yang paling banyak 'laku' dan dicari.

Pada level elektoral, politik identitas tergambar jelas dalam perhelatan Pilkada DKI 2017. Kontestasi politik yang melibatkan Ahok-Djarot, Anis-Sandi, dan Agus-Selfi, dinilai kalangan sebagai pertarungan politik yang sarat permainan identitas. Dua isu identitas paling ramai dimunculkan saat itu adalah etnisitas dan keagamaan. Pada sisi etnisitas, Ahok yang secara etnisitas berlatar China menjadi sasaran empuk lawan politiknya. Sebagai politisi yang nyata-nyata memiliki darah China, dirinya tidak bisa berbuat banyak. Sebaliknya, kubu seberang terus mengangkat isu tersebut hingga menjadi bola panas di kalangan publik. Ibarat bola salju, isu identitas terus menggelinding bebas dan membesar, utamanya seiring

³⁷ Henk Schulte Nordholt, "Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2008).



meluasnya wacana seputar penjajahan ekonomi China dan tersingkirnya kaum pribumi. Menggemanya unsur identitas dalam konstelasi politik DKI Jakarta tahun 2017, menjadi awal kembalinya politik identitas dalam perjalanan demokrasi Indonesia.³⁸

Pola yang sama juga kita temukan pada sirkulasi kepemimpinan di level nasional, Pilpres 2019. Pertarungan perebutan kursi RI 1 yang mempertemukan petahana Jokowi melawan seteru politiknya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto, juga tidak luput dari penggunaan isu identitas. Isu identitas atas nama etnisitas lebih banyak digunakan untuk menyerang dan menekan elektabilitas calon tertentu dan pada saat yang bersamaan 'kekosongan' itu bisa dimanfaatkan oleh calon-calon yang lain. Merebaknya pemberitaan asing-aseng, diangkatnya istilah pribumi sebagai narasi politik, lemahnya kedaulatan negara akibat intervensi asing, eksploitasi kekayaan oleh pendatang, kesemuanya adalah bagian dari instrumen politik identitas yang sejauh ini mewarnai kontestas politik nasional.³⁹

Bagaimana dengan 2024, bercermin pada dinamika politik di tahun 2014 dan 2019, besar kemungkinan situasinya tidak akan jauh berbeda daripada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Penggunaan isu-isu identitas seperti agama dan etnisitas diprediksi akan masih tetap ada dan bermunculan sebagai konsumsi politik publik. Tesis bahwa pemilu 2024 juga akan dipenuhi oleh politik identitas, itu terkonfirmasi jelas dalam temuan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan hasil surveinya, politik identitas yang marak di tahun-tahun sebelumnya besar

³⁸ Djayadi Hanan, "Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 1 (March 4, 2020): 15.

³⁹ Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (July 24, 2020): 43–63.



kemungkinan akan tetap digunakan di tahun 2024, terutama jika komposisi pertarungannya diisi oleh dua paslon (*head to head*), misal Anies vs Ganjar atau Ganjar vs Anies. Komposisi kandidat dua paslon praktis akan memunculkan dua kutub politik dengan latar ideologi berbeda, antara kelompok nasionalis dan Islamis.⁴⁰

b) Politisasi Agama

Dalam banyak dikursus politik kontemporer, pada umumnya tema agama masuk dalam lingkup politik identitas. Namun, pada kesempatan ini sengaja pembahasannya dipisah mengingat politik agama memuat efek lebih besar dari isu identitas pada umumnya. Demikian karena agama dikenal sebagai jenis identitas yang berada di wilayah keyakinan. Agama mengandung makna keagungan, suci, mistik, dan sakral. Karena sifat itulah, tak segan bagi para pemeluknya untuk bersikap totalitas dan fanatik demi membela agama yang dianutnya.

Pada tingkat daerah, gambaran nyata politisasi agama tercermin jelas pada perhelatan Pilkada DKI 2017. Terjeratnya salah satu paslon dalam kasus al-Maidah menjadi letupan awal sintemen agama.⁴¹ Kasus tersebut semakin memanaskan seiring munculnya isu penistaan agama. Puncak dari semuanya adalah lahirnya gerakan aksi bela agama 411 dan 212 yang berisi desakan pada pemerintah untuk secepatnya turun tangan dan mengadili. Intervensi hukum melalui mobilisasi massa besar-besaran, pada akhirnya bukan saja berefek pada tidak sehatnya atmosfer politik DKI Jakarta, namun

⁴⁰ CNN Indonesia CNN Indonesia, "Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar vs Anies," *nasional*, last modified January 13, 2023, accessed May 16, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-899732/survei-smrc-politik-identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs-anies>.

⁴¹ Maulida Sri Handayani, "Kuatnya Sentimen Agama di Pilgub Jakarta," *tirto.id*, last modified February 14, 2017, accessed May 16, 2023, <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>.



secara signifikan juga membuat situasi sosial ekonomi dan politik nasional tidak menentu.⁴²

Satu rupa dengan Pilkada DKI Jakarta, Pilpres 2019 juga tidak luput dari terjangan badai politik agama. Di level politik nasional ini, fenomena politik agama muncul seiring menguatnya beragama isu keagamaan yang menyerang masing-masing paslon, baik 01 maupun 02. Pada paslon 01, tidak jauh beda dengan isu agama ketika pilpres tahun 2014, muncul wacana klasik tentang komunis, keturunan komunis, penganut komunis dan sebagainya.⁴³ Sejarah kelam komunisme dalam masa perjalanan Indonesia kemudian dimanfaatkan kelompok berkepentingan untuk menyerang paslon tertentu. Beberapa isu lain yang memperkuat praktik politisasi agama di Pilpres 2019, seperti isu pelarangan azan di Masjid, penghapusan kurikulum agama, kriminalisasi ulama', bahkan pada isu paling 'lucu' sekalipun, seperti membaca al-Qur'an dan kemampuan menjadi Imam shalat. Sedangkan pada paslon 02, serangan politik agama ditujukan pada mereka dalam bentuk tuduhan penganut aliran keagamaan radikal dan aliran fundamentalis. Mereka diklaim sebagai sarang ormas keagamaan garis keras yang berusaha mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem keyakinan mereka (baca: *khilafah*).⁴⁴

Bagaimana dengan gelaran Pemilu 2024, terutama pertarungan di Pilpres? Jika berkaca pada pengalaman Pemilu sebelumnya, rasa-rasanya

⁴² Grahanusa Mediatama, "Pilkada DKI berpotensi ganggu stabilitas jika...," *kontan.co.id*, last modified April 18, 2017, accessed May 16, 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-dki-berpotensi-ganggu-stabilitas-jika>.

⁴³ Chandra Gian Asmara, "Jokowi Marah, Lagi-lagi Soal Tuduhan PKI," *CNBC Indonesia*, last modified January 9, 2019, accessed May 16, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4-49771/jokowi-marah-lagi-lagi-soal-tuduhan-pki>.

⁴⁴ Irfan Teguh, "Prabowo, Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia," *tirto.id*, last modified April 3, 2019, accessed May 16, 2023, <https://tirto.id/prabowo-isu-khilafah-dan-sejarah-gerakan-islam-politik-indonesia-dkT6>.



sulit menafikan politisasi agama di gelaran kontestasi Pemilu 2024. Dalam konteks politik di Indonesia, isu agama seolah telah menjadi konsumsi politik publik yang senantiasa dimunculkan di setiap gernal perebutan kekuasaan. Demikian bisa dimaklum, karena sebagaimana kita pahami bersama, secara sosiologis masyarakat di Indonesia memiliki kultur keagamaan sangat kuat. Karenanya, berlandaskan kenyataan ini, mustahil mengecualikan kontestasi politik Indonesia dari isu-isu agama. Tidak terkecuali dalam gelaran Pilpres 2024 yang akan datang.

c) Politik Data

Dari semua pola politik *postr-truth* Indonesia, fenomena politik data barangkali merupakan yang paling jarang didengar oleh publik. Memang, pada umumnya politik data lebih banyak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan sejenisnya. Pada perhelatan Pilpres AS 2016, politik data digunakan Trump untuk memuluskan strategi politiknya. Ada sekitar 50 juta data pengguna *facebook* yang bocor itu dimanfaatkan *cambridge analytica*, sebuah perusahaan konsultan politik yang bermarkas di Inggris, untuk memetakan karakteristik pemilih AS, sehingga pada akhirnya turut berperan besar memenangkan Trump dalam Pilpres AS 2016.⁴⁵

Di Indonesia sendiri wacana politik data ramai diperbincangkan seiring tersiarinya kabar ada sekitar 1 juta data lebih pengguna *Facebook* Indonesia yang bocor.⁴⁶ Di luar ini semua, sesungguhnya politik data di

⁴⁵ Bagus Prihantoro Nugroho, "Cambridge Analytica, Panen Data Facebook dan Menangkan Trump," *detiknews*, last modified March 22, 2018, accessed May 16, 2023, <https://news.detik.com/internasional/d-3930184/cambridge-analytica-panen-data-facebook-dan-menangkan-trump>.

⁴⁶ Kompas Kompas, "1 Juta Data Pengguna Asal Indonesia Bocor, Menkominfo Panggil Facebook," *KOMPAS.com*, last modified April 5, 2018, accessed May 16, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17361101/1-juta-data-pengguna-asal-indonesia-bocor-menkominfo-panggil-facebook>.



ruang politik Indonesia sudah berlangsung lama, bahkan telah ada sejak perhelatan Pilpres 2014. Persisnya sejak menggeliatnya penggunaan lembaga konsultan dan survey politik, sejak saat itulah penggunaan politik data berkembang pesat di Indonesia. Sederhananya, dalam konteks politik Indonesia, politik data lebih dominan dimainkan oleh kehadiran lembaga survey. Melalui kelebihan dan keunggulannya melakukan prediksi, lembaga survei telah mampu memainkan peran dan fungsi strategis. Sekurangnya, peran dan fungsi tersebut dapat dilihat dari keberadaan mereka yang saat ini senantiasa menjadi rujukan perhelatan politik. Baik itu di level legislatif, dan terlebih lagi di level eksekutif. Sebagai rujukan politik, lembaga survei tidak saja berkedudukan sebagai lembaga konsultan, namun juga telah dikenal sebagai ‘perangkat’ paling dominan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan sosial-politik. Informasi tingkat elektabilitas dan popularitas kandidat atau calon dalam kontestasi politik tertentu, kesemuanya dapat dijalankan melalui lembaga survei.⁴⁷

Fenomena perang survei yang belakangan kita saksikan di banyak hajatan politik, baik PILKADA maupun Pilpres, adalah gejala paling nyata. Masing-masing lembaga survei menampilkan data atau informasi yang seringkali jauh berseberangan atau berlainan arah dengan hasil survei lainnya.⁴⁸ Menariknya, hal ini tidak kemudian memunculkan pesimisme publik. Sebaliknya, muncul kenyataan di mana opini dan sikap publik dapat dibangun dan dipengaruhi oleh hasil survei tersebut. *Kenyataan inilah yang turut menjadi* faktor munculnya berbagai pro-kontra di kalangan elit

⁴⁷ Bestian Nainggolan, ““Post Truth” Survei Opini Publik,” *kompas.id*, last modified May 14, 2018, accessed May 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/05/14/post-truth-survei-opini-publik>.

⁴⁸ Abd Hannan, “Post-Truth Di Balik Survei Politik,” *Analisadaily.Com*, last modified Mei 2018, accessed May 16, 2023, <https://analisa.link//>.



pemangku kepentingan, kaitannya dengan netralitas dan objektivitas lembaga survey, seperti yang ramai dibicarakan pada perhelatan Pilpres 2019.

Menariknya, meski selama ini penggunaan dan kehadiran lembaga survey menimbulkan perdebatan dan pro-kontra di tengah publik, khususnya terkait independensi dan kredibilitasnya, faktanya sampai detik ini menjelang perhelatan Pemilu 2024 yang akan datang, keberadaan lembaga survei politik masih menjadi bagian tak terpisahkan. Keberadaannya tetap digunakan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu guna mengukur popularitas si calon, dan tidak kalah pentingnya adalah memengaruhi pola pikir dan perilaku politik para pemilih di level akar rumput. Bahkan, jika mencermati dinamika politik menjelang pencalonan Pilpres 2024, tiga nama paling populer yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024, Ganjar, Prabowo, dan Anies ketiganya muncul ke permukaan berdasarkan angka-angka popularitas yang ada di lembaga survei.

Analisis Propaganda Politik Pascakebenaran dan Ancamannya terhadap Bangunan Demokrasi Indonesia

Dari keseluruhan pembacaan di atas, muncul pertanyaan besar yang cukup menarik untuk dijawab, apa dan bagaimana peran sekaligus pengaruh keberadaan politik propaganda politik *posttruth* terhadap bangunan demokrasi kita? Apa mungkin politik propaganda politik *posttruth* sendiri merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi, atau sebaliknya merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri? Dua pertanyaan ini menjadi penting dicari tahu jawabannya, mengingat sejauh ini tema seputar propaganda politik *posttruth* cukup mewarnai perjalanan demokrasi kita, baik pada tataran teoritik maupun di tataran politik praktis seperti yang terjadi di perhelatan pilpres 2014 dan 2019.



Dalam berdemokrasi, hal menyangkut kebebasan berpendapat dan berserikat sejatinya merupakan hal substantial, dirinya adalah representasi kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam perundangan.⁴⁹ Dalam berdemokrasi juga, kita mengenal keberadaan media informasi sebagai corong kebebasan, dengannya setiap warga negara menemukan keleluasaan menyampaikan aspirasi, berbagai gagasan dapat dituangkan, dan yang lebih penting dari itu optimalisasi fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan.⁵⁰ Hanya memang, harus disadari juga bahwa di tengah uforia kebebasan yang kita nikmati, mempesatnya perkembangan teknologi dengan segala bentuk dan variannya, secara langsung telah menghadapkan kita pada kenyataan paradoks.⁵¹ Pada tahap ini, teknologi media informasi yang awalnya kita kenal sebagai medium penguat demokrasi, dalam batasan-batasan tertentu, dapat juga menimbulkan efek buruk yang mengancam keberadaan demokrasi itu sendiri. Efek buruk yang dimaksud merujuk pada semakin luasnya penyebaran berita-berita bohong (*hoaks*), mobilisasi massa melalui propaganda politik di media sosial, radikalisasi agama melalui aktivitas daring, meningkatnya ujaran kebencian, manipulasi fakta, dan lebih parah dari semuanya adalah deligitamsi konsep kebenaran.

Jika pembacaan di atas kita tarik ke dalam wilayah kajian ini, ancaman serupa juga dapat kita temui pada keberadaan politik propaganda politik *posttruth*. Propaganda politik *posttruth* yang selama ini identik

⁴⁹ Abd Hannan and Busahwi Busahwi, "Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik," *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69.

⁵⁰ Abd Hannan, "Regulasi Dana Kampanye Kolektif Untuk Pemilu Yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka," *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (March 31, 2022): 9–24.

⁵¹ Kikue Hamayotsu, "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (November 2013): 658–677.



dengan politik pencitraan, kepalsuan, dan kebohongan, dalam praktiknya berpotensi besar melahirkan kekacauan. Bukan saja pada aspek sosial, namun juga pada aspek tatanan bernegara dan berbangsa. Dalam politik propaganda politik *posttruth*, ketika kebohongan dan intimidasi menjadi jalan politik, maka pada saat bersamaa ruang diskusi politik kita mengalami krisis kearifan dan etika. Dialektika politik dibangun bukan lagi berlandaskan ide-ide produktif melalui perang pemikiran, adu gagasan dan program, melainkan lebih pada dialektika destruktif.⁵² Narasi dibangun lebih banyak dibumbui oleh fitnah, *nyinyir*, saling menghujat dan masih banyak lagi yang diniatkan untuk mendekonstruksi lawan demi meraih keuntungan politik. Seperti halnya beragam isu identitas dan narasi kebencian yang mengalir deras di Pilkada DKI 2017 hingga di Pilpres 2019. Misal, penyebutan asing-aseng, tuduhan komunis, maraknya istilah cebong-kampret, narasi Indonesia bubar, air laut masuk Jakarta, terusirnya kaum pribumi, politik sentoloyo, politik genderowo, dan seabrek narasi politik kebohongan, kebencian, dan intimidasi lainnya. Dengan perilaku politik seperti ini, alih-alih mematangkan proses demokrasi, yang ada adalah pembusukan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks politik Indonesia, propaganda politik *posttruth* menemukan keleluasaannya karena terlalu liarnya cara berpikir kita dalam memaknasi kebebasan. Di banyak tempat, kita mendapati banyak isu kebohongan dan intimidasi bertebaran di banyak media sosial. Tak terkecuali para elit politik yang dalam banyak kesempatan menjadi agen produksi kebohongan terbesar. Menariknya, kita mendapati semua itu sering kali dibangun atas nama kebebasan berpendapat. Dari sini kita melihat, di tengah demokrasi yang kita jalani selama ini, ternyata terdapat kesalahan elementer

⁵² Schindler, "The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics."



dalam memaknai kebebasan itu sendiri. Secara konstitusional, benar demokrasi mengimplikasikan kebebasan, namun kebebasan yang dikehendaki bukanlah kebebasan tanpa batas. Di dalamnya melekat tanggung jawab. Setiap orang memiliki kemerdekaan untuk berpendapat dan menyebarkan informasi kepada siapa pun. Namun harus dilandasi sikap tanggung jawab. Ketiadaan dan ketidakmampuan mengambil tanggung jawab (sebagai konsekuensi kebebasan) akan menjadi pengganjal terwujudnya demokrasi yang beradab.⁵³

Sejauh ini, kita seringkali mengukur kualitas demokrasi berdasarkan angka statistik keterlibatan warga negara dalam proses pemilihan, baik di level daerah maupun nasional. Sayangnya, pada saat bersamaan kita sering kali lupa memperhatikan bagaimana dinamika sosial yang terjadi di tataran masyarakat selama proses pemilihan itu berlangsung, terutama di tengah bergulirnya tahun-tahun politik. Belajar dari kasus tahun politik menjelang Pemilu 2024, mutlak dapat dikatakan betapa sesungguhnya bangunan demokrasi Indonesia tengah mengalami problem krusial. Kondisi ini terjadi tidak lepas dari rendahnya level keadaban politik para pemangku kepentingan yang sedikit banyak telah dipengaruhi tren politik global, propaganda politik *posttruth*.

Dalam kaitan ini, kehadiran propaganda politik *posttruth* melalui intrik kebohongan dan intimidasi yang tersebar luas di ruang publik, baik yang beroperasi dalam jaringan (*daring*) maupun luar jaringan (*luring*), nyatanya bukan saja telah membuat ruang politik menjadi gaduh, namun juga telah menurunkan derajat kualitas demokrasi kita.⁵⁴ Demokrasi yang

⁵³ R. G. Mulgan, "Defining 'Democracy,'" *Political Science* 20, no. 2 (December 1, 1968): 3–9.

⁵⁴ Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional."



idealnya berisikan politik kesantunan, perang gagasan, adu kreatif ide dan pemikiran, dijunjungnya prinsip emansipasi, pluralitas dan toleransi, dalam kenyataannya telah mengalami penyempitan. Tidak hanya itu, ruang dalam jaringan (*daring*) yang awalnya kita harapkan menjadi *new public sphere*, seperti *Facebook*, *Twitter* dan yang baru *Instagram*, tempat di mana aktivitas deliberasi era digital terbentuk, nyatanya jauh panggang dari api. Alih-alih berharap terbentuknya *cyber democracy*, justru yang muncul adalah tumbuh suburnya ruang *echo chambers* (ruang gema). Ruang di mana kebanyakan masyarakat, terutama elit politik selaku pemangku kepentingan, lebih memilih menggemakan narasi politik pragmatis dan jangka pendek daripada politik berkearifan dan berkeadaban.

Simpulan

Politik pascakebenaran adalah politik kekinian yang lahir sebagai wujud perkembangan politik global. Secara historis politik ini menemukan momentumnya pascakemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016. Pada tataran teoritisnya politik pascakebenaran dipahami sebagai budaya politik kontemporer yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan perasaan daripada fakta sesungguhnya. Sedangkan pada tataran praktiknya, politik pascakebenaran beroperasi dalam dua hal, yakni kebohongan dan intimidasi. Berdasarkan ruang operasinya, politik pascakebenaran terjadi dalam dua ruang, yakni ruang luar jaringan (*luring*) dan dalam jaringan (*daring*). Di ruang *luring*, politik pascakebenaran direpresentasikan oleh manuver elit politik di level politik praktis. Sedangkan di *daring*, politik pascakebenaran diproduksi melalui keberadaan media sosial, seperti seperti halnya *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *Instagram*.

Kedua, di Indonesia, politik pascakebenaran mulai memperlihatkan dirinya semenjak menggeliatnya berbagai propaganda politik yang mengarah



pada pemanfaatan isu-isu identitas, seperti agama, suku, dan etnis. Baik propaganda politik di level elektoral maupun di level nasional. Di level elektoral, politik pascakebenaran memperlihatkan gejalanya melalui pemanfaatan isu-isu agama dan etnisitas seperti yang terjadi dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta, dan Pilpres 2019. Sedangkan di level nasional, politik pascakebenaran tergambar jelas melalui massifnya narasi politik kebohongan dan intimidasi, khususnya di tahun-tahun politik menjelang perhelatan Pilpres 2024. *Ketiga*, mengemukakan intrik politik pascakebenaran di Indonesia, baik di level daerah maupun nasional, secara langsung menimbulkan ancaman besar bagi bangunan demokrasi Indonesia. Ancaman tersebut muncul melalui instrumen politik propaganda politik *posttruth* yang menekankan dirinya pada kebohongan dan intimidasi. Dengan politik kebohongan, propaganda politik *posttruth* senantiasa abai pada fakta, memanipulasi kebenaran, mendelegitimasi hukum, dan mereduksi objektivitas pada subjektivitas. Dengan politik intimidasi, propaganda politik *posttruth* berpotensi besar mendatangkan kekacauan. Isu identitas seperti penggunaan SARA, pada praktiknya memicu lahirnya perilaku sintimen sehingga pada ujungnya bukan saja memperkeruh suasana politik, namun juga merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara.

References

- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda." *Jurnal Civics* 13, no. 2 (2016): 8.
- Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (May 1, 2017): 211–236.



- Allen, Joe. "Stephen Colbert Claims 'Post-Truth' Is Just a 'Truthiness' Ripoff." *Paste Magazine*. Last modified November 18, 2016. Accessed May 16, 2023. <https://www.pastemagazine.com/comedy/stephen-colbert/stephen-colbert-claims-post-truth-is-just-a-truthi>.
- Amilin, Amilin. "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 39 (September 2019).
- Antony, Sinoj, and Ishfaq Ahmad Tramboo. "Hyperreality in Media and Literature: An Overview of Jean Baudrillard's." *Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 6.
- Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (July 24, 2020): 43–63.
- Asmara, Chandra Gian. "Jokowi Marah, Lagi-lagi Soal Tuduhan PKI." *CNBC Indonesia*. Last modified January 9, 2019. Accessed May 16, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4-49771/jokowi-marah-lagi-lagi-soal-tuduhan-pki>.
- BBC News, BBC News. "'Post-Truth' Declared Word of the Year by Oxford Dictionaries." *BBC News*. Last modified November 16, 2016. Accessed May 16, 2023. <https://www.bbc.com/news/uk-37995600>.
- Bovet, Alexandre, and Hernán A. Makse. "Influence of Fake News in Twitter during the 2016 US Presidential Election." *Nature Communications* 10, no. 1 (January 2, 2019): 7.
- CNN Indonesia. "Jejak Rasial Trump, Tuding Obama Muslim hingga Benci Imigran." *internasional*. Last modified July 16, 2019. Accessed May 16, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190716114013-134-412497/jejak-rasial-trump-tuding-obama-muslim-hingga-benci-imigran>.
- CNN Indonesia, CNN Indonesia. "Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar vs Anies." *nasional*. Last modified January 13, 2023. Accessed May 16, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-899732/survei-smrc-politik-identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs-anies>.



- Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. "Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 1, 2022): 44–58.
- Golose, Petrus Reinhard. "Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (2019).
- Hamayotsu, Kikue. "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance." *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (November 2013): 658–677.
- Hanan, Djayadi. "Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 1 (March 4, 2020): 15.
- Handayani, Maulida Sri. "Kuatnya Sentimen Agama di Pilgub Jakarta." *tirto.id*. Last modified February 14, 2017. Accessed May 16, 2023. <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>.
- Hanif, Muh. "Studi Media dan Budaya Populer dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (January 1, 1970): 235–251.
- Hannan, Abd. "Post-Truth Di Balik Survei Politik." *Analisadaily.Com*. Last modified Mei 2018. Accessed May 16, 2023. <https://analisa.link//>.
- Hannan, Abd, and Busahwi Busahwi. "Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik." *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69.
- Hannan, Abd. "Regulasi Dana Kampanye Kolektif Untuk Pemilu Yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka." *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (March 31, 2022): 9–24.
- Kompas, Kompas. "1 Juta Data Pengguna Asal Indonesia Bocor, Menkominfo Panggil Facebook." *KOMPAS.com*. Last modified April 5, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17361101/1-juta-data-pengguna-asal-indonesia-bocor-menkominfo-panggil-facebook>.
- Kurniawan, Afrito Eka. "Pemilu Serentak 2024 Picu Munculnya Post Truth Politic | Kumparan.Com." <https://Kumparan.Com/>. Last modified Desember 2022. Accessed May 16, 2023. <https://kumparan.com/236-afrito-eka-kurniawan/pemilu-serentak-2024-picu-munculnya-post-truth-politic-1zXcWfU2Kfm>.
- Latief, Muh Iqbal. "Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019).



- McGlinchey, Edited Stephen, Leo S F Lin, Zeynep Selin Balci, and Patrick Vernon. *Global Politics in a Post-Truth Age*. E-International Relations Bristol: England, 2022.
- Mediatama, Grahanusa. "Pilkada DKI berpotensi ganggu stabilitas jika..." *kontan.co.id*. Last modified April 18, 2017. Accessed May 16, 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-dki-berpotensi-ganggu-stabilitas-jika>.
- Meyer, Renate E., and Paolo Quattrone. "Living in a Post-Truth World? Research, Doubt and Organization Studies." *Organization Studies* 42, no. 9 (September 1, 2021): 1373–1383.
- Mulgan, R. G. "Defining 'Democracy.'" *Political Science* 20, no. 2 (December 1, 1968): 3–9.
- Mutz, Diana C. "Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 19 (May 8, 2018): E4330–E4339.
- Nainggolan, Bestian. "'Post Truth' Survei Opini Publik." *kompas.id*. Last modified May 14, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/05/14/post-truth-survei-opini-publik>.
- Nordholt, Henk Schulte. "Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2008).
- Nugroho, Bagus Prihantoro. "Cambridge Analytica, Panen Data Facebook dan Menangkan Trump." *detiknews*. Last modified March 22, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://news.detik.com/internasional/d-3930184/cambridge-analytica-panen-data-facebook-dan-menangkan-trump>.
- Nugroho, Danu Damarjati, Bagus Prihantoro. "Kaleidoskop 2018: Heboh Prabowo Bicara Prediksi RI Bubar di 2030." *detiknews*. Last modified Des 2018. Accessed May 16, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4357883/kaleidoskop-2018-heboh-prabowo-bicara-prediksi-ri-bubar-di-2030>.
- Nurfaizah, Ayu. "Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024." *kompas.id*. Last modified March 2, 2023. Accessed May 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang-pemilu-2024>.
- Poulakidakos, Stamatis, Anastasia Veneti, and Christos Fangonikolopoulos. "Post-Truth, Propaganda and the Transformation of the Spiral of



- Silence.” *International Journal of Media & Cultural Politics* 14 (September 1, 2018): 367–382.
- Ratumakin, Roy. “Tensi Politik Meningkat, Sosok Ini Presiden di 2024 Gantikan Jokowi?” *Tribun-papua.com*. Last modified June 5, 2022. Accessed May 16, 2023. <https://papua.tribunnews.com/2022/06/05/tensi-politik-meningkat-sosok-ini-presiden-di-2024-gantikan-jokowi>.
- Redaksi. “Menjaga Tensi Politik.” *kompas.id*. Last modified October 4, 2022. Accessed May 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/04/menjaga-tensi-politik>.
- Ritser, George. *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern*. IV. Bantul: Kreasi wacana, 2010.
- Sahabi, Omen, and Ilya Nacho. *The Consequences of Political Identity for a Democratic System*. Preprint. Thesis Commons, February 18, 2020. Accessed May 16, 2023. <https://osf.io/pdnfc>.
- Schindler, Sebastian. “The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics.” *Review of International Studies* 46, no. 3 (July 2020): 376–394.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, Cet. XV*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suharyanto, Cosmas Eko. “Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review.” *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10, no. 2 (2019).
- Suryowati, Estu. “Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan.” *Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan - Jawa Pos*. Last modified August 17, 2021. Accessed May 16, 2023. <https://www.jawapos.com/politik/01339706/panas-lebih-cepat-peta-pilpres-2024-bakal-mulai-terlihat-tahun-depan>.
- Suzina, Ana Cristina. “Brazil, Hijacked by Post-Truth.” *OpenDemocracy*. Last modified October 22, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil-hijacked-by-post-truth/>.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DO - 10.18326/ijims.v10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020). <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.



- Teguh, Irfan. "Prabowo, Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia." *tirto.id*. Last modified April 3, 2019. Accessed May 16, 2023. <https://tirto.id/prabowo-isu-khilafah-dan-sejarah-gerakan-islam-politik-indonesia-dkT6>.
- Tesich, Steve. "A Government of Lies." Last modified 1992. Accessed May 16, 2023. <https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982>.
- . "A Government of Lies." *The Nation (New York, N.Y.)* 254, no. 1 (1992): 12-.
- theguardian.com, theguardian.com. "'Post-Truth' Named Word of the Year by Oxford Dictionaries." *The Guardian*. Last modified November 15, 2016. Accessed May 16, 2023. <http://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries>.
- Waldman, Paul. "How America Skidded from 'Truthiness' to 'Post-Truth.'" *The Week*. Last modified November 29, 2016. Accessed May 16, 2023. <https://theweek.com/articles/664112/how-america-skidded-from-truthiness-posttruth>.

